

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap upaya untuk menghadirkan ajaran Islam bagi perbaikan kualitas kehidupan manusia selalu saja menarik untuk diwacanakan, dikaji, diteliti, bahkan diwaspadai. Apalagi menyangkut wilayah publik dan kekuasaan. Bentuk perhatian orang dikemukakan sesuai dengan posisi dan kepentingan masing – masing. Persoalan hubungan antara politik dengan agama (Islam) telah lama dipahami sebagai dua karakter yang terpisah. Agama yang diyakini suci harus dijauhkan dari politik yang penuh intrik, licik, dan kotor. Posisi dikotomi ini telah menjadi *mind set* banyak kalangan. Hingga pada gilirannya, dipahami bahwa agama (Islam) tidak pantas memasuki wilayah politik dan sebaliknya politik haram memasuki wilayah agama (Islam) (Nashir Fahmi, 2006: 2).

Sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa Islam adalah agama sempurna, mencakup seluruh urusan kehidupan manusia yang terdiri dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara serta segala aktivitas yang meliputinya, seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, hukum, dan lain sebagainya. Islam tidak memilah antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam setiap aktivitas mengandung unsur dunia dan akhirat sekaligus. Dengan demikian, semua ibadah baik *mahdhah* (khusus) maupun *ghairu mahdhah* (umum) di dalam Islam, memiliki kedudukan yang sama, termasuk politik. Karena politik adalah

bagian dari keuniversalan Islam maka diyakini bahwa Islam memiliki sistem politik yang bersumber dari Allah. Memisahkan politik dari Islam berarti telah mengebiri ajaran Islam dan telah menjauhkan ummat dari keaslian Islam (Nashir Fahmi, 2006: 25).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai bagian entitas perpolitikan di Indonesia dari awal pendiriannya (tahun 1998) sampai sekarang telah mengalami dinamika yang begitu kompleks. Salah satu diantaranya adalah dalam proses memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat yang sarat akan perubahan. Sebelum memasuki wilayah praksis politik, strategi PKS sebagai gerakan dakwah waktu itu dilakukan secara kultural. Hal ini dimaksudkan agar setiap upaya transformasi ideologi Islam dapat ditanamkan dalam setiap aktifitas kehidupan masyarakat.

Namun pasca terbentuknya gerakan dakwah itu menjelma menjadi sebuah partai politik, strategi tidak hanya secara kultural saja namun secara struktural pun dilakukan. Dengan demikian selain menyiapkan masyarakat agar menerima *manhaj*/sistem Islam secara horisontal (*gerakan kultural*) PKS juga menyiapkan infrastruktur secara vertikal (*gerakan struktural*). Hal ini dimaksudkan dalam upaya membuat regulasi kebijakan pembangunan politik negara. Sehingga muncul asumsi publik, menurut Imdadun Rahmat (2008: 7) atas kehadiran PKS dalam kancah politik Indonesia akan menghadirkan dua wajah yaitu harapan dan sekaligus kecemasan.

Kemajemukan Indonesia diantaranya adalah beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Bahasa daerah adalah salah satu bentuk keberagaman tersebut. Sebagai kader dari sebuah partai tentu kecerdasan budaya menjadi salah satu faktor yang harus dimiliki. Namun para kader PKS di Klaten sebagian besarnya kurang menguasai kebudayaan Jawa. Sehingga PKS kurang bisa berinteraksi dengan masyarakat desa. Hal ini menyebabkan strategi politik PKS tidak berjalan dengan efektif.

Secara Ideologi PKS merupakan partai Islam yang memiliki visi umum sebagai partai dakwah pelopor penegakan sistem Islam dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa. PKS juga memiliki visi khusus yaitu terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala., dalam NKRI. Namun demikian, sampai sekarang belum ada indikasi tercapainya cita-cita tersebut secara total.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai karakteristik wilayahnya yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Setiap saat Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam bentuk masalah dari mulai aspek hukum, politik, ekonomi, budaya, serta pendidikan yang kian silih berganti termasuk kondisi masyarakatnya. Di Indonesia pun dikenal budaya masyarakat "abangan". Yakni masyarakat yang memeluk agama Islam, tetapi tidak melaksanakan/mengamalkan ajaran Islam. Dengan demikian PKS sebagai sebuah partai politik tentunya dituntut harus mampu menyesuaikan diri terhadap arah gerak politiknya dengan Pancasila.

Dikarenakan Pancasila merupakan sebuah konsensus / kesepakatan bersama yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.

Kabupaten Klaten adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah yang memiliki kultur budaya yang bisa dikatakan “abangan”. Maksudnya adalah meskipun mayoritas masyarakat Klaten beragama Islam, tetapi masih banyak yang belum melaksanakan ajaran Islam dengan sepenuhnya. Karena memang pemahaman masyarakat tentang Islam masih rendah. Kultur budaya masyarakat Klaten yang abangan ini juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berpolitik.

Pendapat atau sumber yang menyebutkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki kultur budaya yang abangan adalah dari masyarakat secara umum dan juga dari pengurus PKS Kabupaten Klaten. PKS sebagai partai dakwah tentu juga memiliki strategi khusus dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat abangan di Kabupaten Klaten. Karena sebab itulah peneliti memilih PKS Kabupaten Klaten untuk dijadikan penelitian tugas akhir skripsi.

Selama masa reformasi telah berlangsung tiga kali pemilihan umum, yakni tahun 1999, 2004 dan 2009. Dalam tiga pemilihan umum tersebut Kabupaten Klaten selalu dimenangi oleh PDIP. Tetapi dalam kondisi kultur budaya yang abangan, PKS sebagai partai dakwah yang berasas Islampun bisa eksis dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari selalu meningkatnya perolehan suara PKS di Kabupaten Klaten dari pemilu 1999, 2004 dan 2009. Pada pemilu 1999 PKS memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten Klaten, pemilu 2004 mendapat

5 kursi DPRD, dan pada pemilu 2009 mendapat 5 kursi DPRD. (Sumber : KPUD Klaten)

Munculnya partai-partai Islam dalam kancah politik ialah bukti konkrit adanya partisipasi umat Islam Indonesia dalam bidang politik, telah menghiasi percaturan politik tanah air. Realitas tersebut bertentangan dengan argumen Huntington yang menganggap bahwa partisipasi politik merupakan konsep yang tidak cocok bagi masyarakat muslim seperti halnya Indonesia, walaupun ada partisipasi itupun terkait dengan ikatan keagamaan, karena di dalam Islam tidak ada perbedaan antara komunitas agama dan komunitas politik (Saeful Mujani, 2007:26), pada dasarnya menurut Saeful Mujani (2007:322) argumen dari Huntington tersebut secara empiris tidak benar, karena pada dasarnya Islam mendorong penganutnya untuk aktif dalam politik. Unsur-unsur ibadah dan sosial memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik, karena unsur-unsur tersebut turut terkait dengan berbagai masalah publik dan berbagai aksi yang berkaitan dengan berbagai masalah politik, entah bersifat keagamaan atau non keagamaan.

Sehingga keadaan itulah yang dibuktikan oleh umat Islam Indonesia masa kini untuk terus dan lebih eksis dalam berpartisipasi dalam politik di Indonesia. Hal itu terbukti masih adanya dukungan terhadap partai-partai Islam, yang salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meskipun dukungan yang diberikan belum optimal dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa PKS masih diharapkan

dan menjadi tumpuan masyarakat Indonesia dan Kabupaten Klaten khususnya dalam menyalurkan aspirasi politiknya, PKS (Partai Keadilan Sejahtera yang dulunya PK (Partai Keadilan), mengalami peningkatan sekitar 500 % pada pemilu tahun 2004 dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mencoba menelusuri strategi PKS Kabupaten Klaten sebagai partai dakwah yang berasas Islam dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat "abangan". Jawaban yang ingin dicari oleh peneliti adalah, mengapa PKS sebagai partai dakwah berasas Islam dapat eksis dan diterima oleh masyarakat yang kultur budayanya adalah abangan. Strategi apa yang dilakukan oleh PKS untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, atau upaya apa yang dilakukan oleh PKS untuk memberikan pemahaman tentang Islam kepada masyarakat. Penelitian ini akan difokuskan di wilayah Kabupaten Klaten dimana peneliti tinggal.

B. Identifikasi Masalah

1. Tantangan PKS terhadap kondisi masyarakat yang memiliki kultur budaya abangan.
2. PKS belum bisa diterima oleh masyarakat luas.
3. Belum signifikannya partisipasi umat Islam dalam memilih partai Islam yang ada di Indonesia.
4. PKS masih terkesan eksklusif, dianggap sebagai partainya para santri / orang masjid.

5. Sebagian besar kader PKS kurang memahami dan menguasai kebudayaan Jawa.
6. Lemahnya strategi politik PKS.
7. Ketidakefektifan PKS dalam upaya transformasi ideologi politiknya (Islam) terhadap kehidupan bangsa dan negara.

C. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya bahasan yang akan dikaji, maka penelitian ini dibatasi pada strategi PKS Kabupaten Klaten dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat abangan.

D. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi perolehan suara PKS dalam pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009 di wilayah Kabupaten Klaten?
2. Bagaimanakah pandangan PKS terhadap masyarakat abangan dan santri?
3. Bagaimanakah strategi PKS Kabupaten Klaten dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat abangan?
4. Bagaimanakah strategi politik PKS pada pemilu 1999, 2004, 2009, prediksi perolehan suara PKS Kabupaten Klaten pada pemilu 2014?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara PKS dalam pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009 di wilayah Kabupaten Klaten. Dan mengetahui perolehan suara PKS dalam pemilu 1999, 2004 dan 2009 di wilayah Kabupaten Klaten

2. Mengetahui strategi PKS Kabupaten Klaten dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat abangan.
3. Mengetahui strategi politik PKS pada pemilu 1999, 2004 dan 2009? Dan mengetahui prediksi perolehan suara PKS Kabupaten Klaten pada pemilu 2014?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat:

- a. Menambah perbendaharaan wawasan tentang politik dan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan bagi jurusan PKn dan Hukum dan khususnya dalam bidang politik
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya mengenai strategi politik PKS maupun partai politik yang lain

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Mengembangkan daya berfikir dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari di perguruan tinggi untuk dapat menambah pengalaman dalam rangka mengembangkan dan membandingkan beberapa kajian teori yang diperoleh dengan realita yang terjadi di lapangan.
- 2) Menambah kesiapan dan wawasan peneliti sebelum terjun kedalam masyarakat.

b. Bagi partai yang bersangkutan (PKS)

- 1) Penelitian ini dapat menjadi masukan evaluasi sekaligus saran dan kritik terhadap strategi yang dijalankan PKS dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat abangan.
- 2) Menjadi referensi di wilayah lain terkait dengan pandangan masyarakat terhadap PKS.
- 3) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih PKS dalam Pemilu.

c. Bagi masyarakat umum dan pemerhati politik

- 1) Penyajian data ilmiah atas realitas politik di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Klaten
- 2) Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemikiran politik

G. Batasan Pengertian

Batasan pengertian dimaksudkan untuk memperoleh deskripsi yang lebih jelas tentang maksud judul yang dipilih, sehingga dapat terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap pemilihan judul dalam penelitian ini.

- a. Strategi politik ialah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh birokrasi, pemerintah, partai atau politisi untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ialah partai politik yang berasas Islam yang lahir dengan nama Partai Keadilan (PK) dalam pemilu 1999 dan berasimilasi menjadi PKS pada tanggal 20 April 2002.

- c. Wilayah ialah daerah kewenangan dan kekuasaan yang dibatasi oleh wilayah lainnya.
- d. Partai dakwah, yakni partai yang mendeklarasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang dan merealisasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan.
- e. Asas Islam ialah dasar, pondasi, kaidah Islam dalam ini berarti Islam dijadikan sebagai dasar, landasan atau penuntun dalam melakukan aktivitas politik.
- f. Pendidikan politik ialah suatu aktifitas yang dilakukan dalam rangka memberikan penyadaran atau pemahaman tentang politik terhadap masyarakat.
- g. Masyarakat abangan adalah meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, tetapi masih banyak yang belum melaksanakan ajaran Islam dengan sepenuhnya.

Dari definisi-definisi di atas secara keseluruhan judul penelitian ini dimaksudkan untuk mencoba mengetahui secara deskriptif analitik mengenai strategi yang dilakukan oleh PKS Kabupaten Klaten dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat abangan. Hal yang menarik adalah PKS sebagai partai dakwah berasas Islam dapat eksis dan diterima oleh masyarakat yang memiliki kultur budaya abangan.